



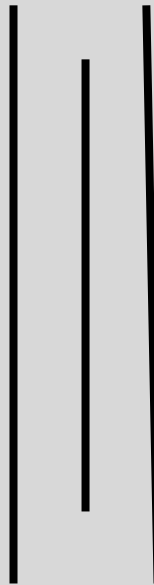
**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT**

LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

TAHUN 2014

(Audited)



**JL. SOEKARNO HATTA NO. 627 TELP (022) 7310435
JL. KAWALUYAAN INDAH II NO. 4 SOEKARNO HATTA
TELP (022) 7320048 FAKS. (022) 7320049
WEBSITE: [HTTP://BAPUSIPDA.JABARPROV.GO.ID](http://BAPUSIPDA.JABARPROV.GO.ID)
E-MAIL: BAPUSIPDA@JABARPROV.GO.ID BANDUNG KODE POS 40286**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* telah menyusun laporan keuangan OPD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2014 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas OPD.
3. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2014 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 28 Mei 2015

KEPALA BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Hj. TATI IRIANI, S.H. MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19590422 198503 2 005

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	6
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	2
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Strategis	4
2.3 Kebijakan Keuangan	6
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	9
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	10
Bab IV Kebijakan Akuntansi	12
4.1 Entitas Akuntansi	12
4.2 Pendekatan Penyusunan laporan keuangan	13
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	19
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	20
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
5.1.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	20
5.1.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
5.1.3 Catatan Penting Lainnya	28
5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	29
5.2.1 Penjelasan Umum Neraca	29
5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca	29
5.2.2.1 Aset Lancar	29
5.2.2.2 Aset Tetap	34
5.2.2.3 Aset Lainnya	50
5.2.2.4 Kewajiban Jangka Pendek	55

5.2.2.5 Ekuitas Dana Lancar	55
5.2.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan	56
5.2.3 Catatan Penting Lainnya	56
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non-Kuangan OPD	58
Bab VII Penutup	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Lampiran-1: Daftar Piutang Pajak Daerah
- Lampiran-2: Daftar Piutang Retribusi Daerah
- Lampiran-3: Daftar Saldo Persediaan
- Lampiran-4: Daftar Rekap Persediaan
- Lampiran-5: Daftar Mutasi Aset Tetap
- Lampiran-6: Daftar Realisasi mutasi Aset Tetap
- Lampiran-7: Daftar Realisasi mutasi Aset Lainnya
- Lampiran-8: Daftar Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA
- Lampiran-9: Daftar Rekonsiliasi Saldo Aset Tetap menurut Neraca dan Atisisbada/Buku Inventaris
- Lampiran-10: Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan/Stok opname
- Lampiran-11: Berita Acara Pemeriksaan Kas Bend. Pengeluaran
- Lampiran-12: Salinan Rekening Koran Bank
- Lampiran-13: Berita acara serah/Terima Barang
- Lampiran-14: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 028/Kep.716-PBD/2014 Tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Alat Perlengkapan Kantor.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 28 Mei 2015

**KEPALA BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

**Hj. TATI IRIANI, S.H., MM.
NIP 19590422 198503 2 005**

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat** ini **belum***) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat** Tahun 2014 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II.

Laporan Keuangan **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat** Tahun 2014 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah **Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat**.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode (1 Januari s.d. 31 Desember 2014).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2014 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0 persen, Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0 persen dari anggaran serta sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2014 adalah sebesar Rp 42.117.001.668,00 atau mencapai 91 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 16.267.800.977,00 atau 95 persen dari anggarannya, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 13.605.424.599,00 atau 90 persen dari anggarannya, Belanja Barang dan Jasa (Belanja Hibah) sebesar Rp. 2.809.666.475,00 atau 77 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp 9.434.109.617,00 atau 89 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2014		TA 2013	
	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi	Anggaran Stlh perubahan	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00

Retribusi Daerah				
Belanja Daerah	46.517.979.500,00	42.117.001.668,00	58.096.972.100,00	50.536.768.394,00
Belanja Operasi	35.921.868.960,00	32.682.892.051,00	40.621.325.230,00	35.016.735.869,00
Belanja Modal	10.596.110.540,00	9.434.109.617,00	17.475.646.870,00	15.520.032.525,00
Surplus/(Defisit)	(46.517.979.500,00)	42.117.001.668,00	58.096.972.100,00	50.536.768.394,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 131.793.670.906,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 3.556.500,00, Aset Tetap sebesar Rp 129.312.104.698,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.478.009.708,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.0,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 131.793.670.906,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 3.556.500,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 131.790.114.406,00.

Ringkasan Neraca dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(dalam rupiah)
	31 Desember 2014	31 Desember 2013 (Audited)	Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	131.793.670.906,00	122.091.238.733,00	9.702.432.173,00
Aset Lancar	3.556.500,00	4.171.600,00	(615.100)
Aset Tetap	129.312.104.698,00	119.498.218.581,00	9.813.886.117,00
Aset Lainnya	2.478.009.708,00	2.588.848.552,00	(110.838.844,00)
Kewajiban	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Ekuitas Dana	131.793.670.906,00	122.091.238.733,00	9.702.432.173,00
Ekuitas Dana Lancar	3.556.500,00	4.171.600,00	(615.100)
Ekuitas Dana Investasi	131.790.114.406,00	122.087.067.133,00	9.703.047.273,00

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
(Format PP Nomor 71 Tahun 2010)

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		-	-		-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah					
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah					
	JUMLAH		-	-		-
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI		35,921,868,960.00	32,682,892,051.00	91%	35,016,735,869.00
2.1.1	Belanja Pegawai		17,158,353,500.00	16,267,800,977.00	95%	16,305,489,179.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		15,116,515,460.00	13,605,424,599.00	90%	12,761,032,649.00
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah		3,647,000,000.00	2,809,666,475.00	77%	5,950,214,041.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2	BELANJA MODAL		10,596,110,540.00	9,434,109,617.00	89%	15,520,032,525.00
2.2.1	Belanja Tanah		-	-		
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		6,662,110,540.00	5,631,178,170.00	85%	3,462,727,790.00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		174,000,000.00	165,815,771.00	95%	398,228,623.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-		
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		3,640,000,000.00	3,518,394,216.00	97%	6,701,706,112.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		120,000,000.00	118,721,460.00	99%	4,957,370,000.00
	JUMLAH		46,517,979,500.00	42,117,001,668.00	91%	50,536,768,394.00
	SURPLUS/(DEFISIT)		(46,517,979,500.00)	(42,117,001,668.00)	91%	(50,536,768,394.00)

Bandung, 28 Mei 2015
Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Hj. TATI IRIANI, S.H., MM.
NIP. 19590422 198503 2 005

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
(Format Permendagri No. 13 tahun 2006)

No.	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			-
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			-
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah			-
	JUMLAH	-	-	-
2	BELANJA			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15,893,191,500.00	15,273,392,077.00	(619,799,423.00)
2.1.1	Belanja Pegawai	15,893,191,500.00	15,273,392,077.00	(619,799,423.00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	30,624,788,000.00	26,843,609,591.00	(3,781,178,409.00)
2.2.1	Belanja Pegawai	1,265,162,000.00	994,408,900.00	(270,753,100.00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,763,515,460.00	16,415,091,074.00	(2,348,424,386.00)
2.2.3	Belanja Modal	10,596,110,540.00	9,434,109,617.00	(1,162,000,923.00)
2.2.3.1	Belanja Tanah	-	-	-
2.2.3.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6,662,110,540.00	5,631,178,170.00	(1,030,932,370.00)
2.2.3.3	Belanja Gedung dan Bangunan	174,000,000.00	165,815,771.00	(8,184,229.00)
2.2.3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
2.2.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,640,000,000.00	3,518,394,216.00	(121,605,784.00)
2.2.3.6	Belanja Aset Lainnya	120,000,000.00	118,721,460.00	(1,278,540.00)
	JUMLAH	46,517,979,500.00	42,117,001,668.00	(4,400,977,832.00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46,517,979,500.00)	(42,117,001,668.00)	4,400,977,832.00

Bandung, 28 Mei 2015
Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Hj. TATI IRIANI, S.H., MM.
NIP. 19590422 198503 2 005

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Format PP Nomor 71 Tahun 2010)

NO	URAIAN	Ref	2014	2013 (Audited)
I	ASET			
I.1.	ASET LANCAR			
	Kas di Bendahara Pengeluaran			
	Kas di Bendahara Penerimaan			
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			
	Piutang Pajak dan Retribusi			
	Piutang Lainnya			
	Persediaan		3,556,500.00	4,171,600.00
	Biaya Dibayar di Muka			
	Jumlah Aset Lancar		3,556,500.00	4,171,600.00
I.3.	ASET TETAP			
	Tanah		11,075,160,000.00	11,075,160,000.00
	Peralatan dan Mesin		48,554,416,109.00	42,556,163,679.00
	Gedung dan Bangunan		51,824,059,374.00	51,526,819,903.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan		289,103,779.00	289,103,779.00
	Aset Tetap Lainnya		17,569,365,436.00	14,050,971,220.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
	Jumlah Aset Tetap		129,312,104,698.00	119,498,218,581.00
I.4.	ASET LAINNYA			
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	Bagian Jangka Panjang Penjualan Angsuran			
	Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi			
	Aset Tak Berwujud		2,478,009,708.00	2,265,120,035.00
	Aset Lain-lain		-	323,728,517.00
	Jumlah Aset Lainnya		2,478,009,708.00	2,588,848,552.00
	JUMLAH ASET		131,793,670,906.00	122,091,238,733.00
II	KEWAJIBAN			
II.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya			
	Pendapatan Diterima Dimuka			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
III	EKUITAS DANA			
III.1.	EKUITAS DANA LANCAR			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		-	-
	Pendapatan yang Ditangguhkan		-	-
	Cadangan Piutang		-	-
	Cadangan Persediaan		3,556,500.00	4,171,600.00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		3,556,500.00	4,171,600.00
III.2.	EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		129,312,104,698.00	119,498,218,581.00
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		2,478,009,708.00	2,588,848,552.00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		131,790,114,406.00	122,087,067,133.00
	JUMLAH EKUITAS DANA		131,793,670,906.00	122,091,238,733.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		131,793,670,906.00	122,091,238,733.00

Bandung, 28 Mei 2015
Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Hj. TATI IRIANI, S.H.,MM.
NIP. 19590422 198503 2 005

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I. PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi OPD, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan OPD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Landasan Hukum

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sistematika
a

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.3. Catatan Penting Lainnya
- 5.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - 5.2.1. Penjelasan Umum Neraca
 - 5.2.2. Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.2.3. Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan OPD

Bab VII Penutup

Bab II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi Makro

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Rencana Strategis *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* merupakan pedoman kegiatan dan arahan kebijakan dan strategi pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 2013 – 2018.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013 bidang Perpustakaan termasuk dalam penjabaran misi pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, sedangkan bidang kearsipan termasuk dalam misi ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik.

Rencana Kerja *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* merupakan dokumen perencanaan tahunan instansi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013 – 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*

Visi

Visi *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* adalah Perpustakaan dan Kearsipan yang Berkualitas dan Terpercaya.

Misi

1. Mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;
2. Mewujudkan tertib arsip;
3. Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
5. Memenuhi standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan;
6. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan. Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 7 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya, *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah TA 2014 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disepakati antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor.18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18 Seri A)
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor 75 Seri A)
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47)
- f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/kep 1553-PBD/2013 tanggal 07 November 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.
- h. Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/KEP.01/SEKRE/2014 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/KEP.177/SEKRE/2014 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/KEP.01/SEKRE/2014 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang harus diimplementasikan melalui program serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Bapusipda provinsi Jawa Barat, maka rincian strategi dan kebijakan Bapusipda Provinsi Jawa barat periode tahun 2013 – 2018 atau untuk 5 tahun ke depan adalah :

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, strategi dan kebijakannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat menuju perpustakaan bertaraf internasional (world of library);
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana gedung perpustakaan umum sesuai standarisasi dan penguatan performance perpustakaan;
 - c. Peningkatan pengolahan bahan perpustakaan secara intensif;
 - d. Peningkatan pelestarian dan konservasi bahan perpustakaan untuk kelengkapan warisan budaya bangsa (national heritage);
 - e. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis sistem e-library, penerapan sistem ISO;
 - f. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui gerakan road show membaca atau safari gerakan membaca; perpustakaan keliling;
 - g. Pengembangan kualitas dn kuantitas pustakawan sesuai standar kompetensi pustakawan;
 - h. Peningkatan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dengan cara memberikan bantaun stimulan kepada desa se-Jawa Barat berupa buku-buku, gerobak baca sarana baca lainnya yaitu rak buku, meja baca, kursi baca melalui mekanisme hibah;
 - i. Peningkatan pembinaan perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data perpustakaan;
 - j. Implementasi Undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan mengintensifkan sosialisasi dan apresiasi di kalangan penerbit;
 - k. Peningkatan kerjasama jaringan perpustakaan secara regional, nasional serta internasional.
2. Program Pengembangan Kearsipan, strategi dan kebijakannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kualitas dan kuantitas khasanah arsip Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai memori kolektif bangsa dan dunia (memory of nation and world)
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kearsipan sesuai standarisasi dan penguatan performance kearsipan;

- c. Peningkatan pengolahan kearsipan secara intensif;
- d. Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan secara elektronik (e-records dan e-archives);
- e. Pemberdayaan record center di seluruh Organisasi Perangkat Daerah provinsi dengan membangun koordinasi dan komunikasi secara intensif;
- f. Pengembangan kualitas dan kuantitas arsiparis sesuai standar kompetensi arsiparis;
- g. Pengembangan pembudayaan sadar arsip bagi aparatur dan masyarakat;
- h. Peningkatan pembinaan kearsipan terhadap organisasi kearsipan untuk mencapai akreditasi kearsipan terbaik;
- i. Peningkatan penyelenggaraan program Arsip Masuk Desa, dengan cara memberikan bantuan stimulan kepada desa se- Jawa Barat berupa sarana kearsipan seperti filing kabinet, boks arsip;
- j. Peningkatan kemampuan aparat desa/kelurahan dalam mengelola arsip desa/kelurahan melalui bimbingan teknis kearsipan;
- k. Peningkatan pengamanan arsip vital/arsip aset dan arsip terjaga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alih media dan atau digitalisasi arsip;
- l. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip bernilai kesejarahan lokal Jawa Barat;
- m. Pengkajian dan pengembangan management disaster archives pasca bencana;
- n. Peningkatan layanan arsip melalui optimalisasi jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Dalam rangka mengimplementasikan strategi kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, target kinerja yang ingin dicapai periode 2013 – 2018 adalah :

1. Terbinanya lembaga perpustakaan dan kearsipan secara efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya jumlah SDM perpustakaan dan kearsipan secara proporsional dalam kuantitas dan kualitas;
3. Terpenuhinya jumlah koleksi buku perpustakaan secara optimal dan representatif;
4. Terwujudnya sistem otomasi layanan perpustakaan secara modern dan efektif;
5. Tercapainya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
6. Terwujudnya pengembangan kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara tepat guna;
7. Terpenuhinya pelayanan informasi kearsipan pemerintah daerah secara cepat, tepat dan akurat;
8. Terlaksananya akuisisi dan pelestarian arsip statis secara berkelanjutan;
9. Terpenuhinya Record Center atau Pusat Arsip Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai standarisasi;
10. Terlaksananya pengamanan arsip vital atau arsip aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara efisien dan efektif.

Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2014 adalah sebesar Rp... atau ... persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,0
- b. Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp.0,0 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,0
- c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 0,0 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,0
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 0,0 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,0

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 0,0 sedangkan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 0,0 Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp.0,0 atau ...persen dibanding TA 2013.

BELANJA

Belanja

Realisasi Belanja TA 2014 sebesar Rp 42.117.001.668,00 atau 91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 46.517.979.500,00. Rincian berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 32.682.892.051,00 atau 91 persen dari yang dianggarkan, terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp.16.267.800.977,00 atau 95 persen dari yang dianggarkan.
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 13.605.424.599,00 atau 90 persen dari yang dianggarkan
 - c) Belanja Hibah sebesar Rp 2.809.666.475,00 atau 77 persen dari yang dianggarkan
- b. Belanja Modal sebesar Rp 9.434.109.617,00 atau 89 persen dari yang dianggarkan, terdiri dari:
 - a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan.
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 5.631.178.170,00 atau 85 persen dari yang dianggarkan.
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 165.815.771,00 atau 95 persen dari yang dianggarkan.
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 0,00 atau 0 persen dari yang

dianggarkan.

- e) Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.518.394.216,00 atau 97 persen dari yang dianggarkan.
- f) Belanja Aset Lainnya sebesar Rp. 118.721.460,00 atau 99 persen dari yang dianggarkan.

Sedangkan Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 berdasarkan jenis belanja sesuai format PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2014		TA 2013	
	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	35.921.868.960,00	32.682.892.051,00	40.621.325.230,00	35.016.735.869,00
Belanja Pegawai	17.158.353.500,00	16.267.800.977,00	17.529.223.000,00	16.305.489.179,00
Belanja Barang dan Jasa	15.116.515.460,00	13.605.424.599,00	16.282.054.830,00	12.761.032.649,00
Belanja Hibah	3.647.000.000,00	2.809.666.475,00	6.810.047.400,00	5.950.214.041,00
Belanja Modal	10.596.110.540,00	9.434.109.617,00	17.475.646.870,00	15.520.032.525,00
JUMLAH	46.517.979.500,00	42.117.001.668,00	58.096.972.100,00	50.536.768.394,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 42.117.001.668,00 sedangkan tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 50.536.768.394,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2014 menurun sebesar Rp 8.419.766.726,00. atau 16,73 persen dibanding TA 2013. Penurunan ini disebabkan karena Jumlah anggaran tahun 2014 menurun dari anggaran tahun 2013;

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Penyebab Capaian Target Pendapatan

Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar 0 persen., realisasi pendapatan tersebut (*belum mencapai/sudah melebihi*) 100% dari target penerimaan.

Penyebab Capaian Target Belanja

Persentase Realisasi Belanja pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 sebesar 91 %, penyerapan anggaran tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan karena :

- Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa

hanya terealisasi sebesar 73,53% dari yang dianggarkan karena efisiensi hasil lelang;

- Kegiatan Optimalisasi ISO Bapusipda Provinsi Jawa Barat terealisasi sebesar 45,60% dari yang dianggarkan karena yang disertifikasi ISO;9001 baru bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
- Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi SDM dan Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan terealisasi sebesar 60,65% dari yang dianggarkan karena akreditasi dan sertifikasi SDM dan lembaga perpustakaan tidak bisa dilaksanakan, Bapusipda bekerja sama dengan PERPUSNAS RI tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena waktu yang tidak memungkinkan;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 74,92% karena pembatalan kontrak pengadaan meja karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan hasil efisiensi pengadaan sarana dan prasarana lainnya.

Bab IV**KEBIJAKAN AKUNTANSI****4.1. ENTITAS AKUNTANSI***Entitas
Akuntansi*

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2014, entitas akuntansi pada *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah <i>(Diisi dg jumlah Sub Bid/Sub Bag/Sub Satker)</i>
1	Sekretariat	3 Sub Bagian
2	Bidang Pengelolaan Kearsipan	-
3	Bidang Akuisisi dan Pelestarian	-
4	Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	-
5	Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca	-
6	Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan	-
	Total	3 Sub Bagian

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh pengurus barang dan penyimpan barang, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1
2	Pengurus Barang	1
3	Pengurus Barang Pembantu	1
4	Penyimpan Barang	1
5	Penyimpan Barang Pembantu	1
	Total	5

4.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*. Laporan Realisasi APBD terdiri dari Pendapatan dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Lampiran II. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendapat an

(1) Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sesuai format PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP dan menurut klasifikasi APBD/DPA sesuai format Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari Kas Umum Daerah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan **Tuntutan Ganti Rugi (TGR)** yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan cara:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk **selain kas**. Biaya Dibayar di muka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

Investasi

b. Investasi ^{)}**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu

^{**)} jika terdapat transaksi investasi pada OPD yang bersangkutan

setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) **Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMD.

PMD dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

*Aset
Tetap*

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca *Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat* per 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai perolehannya.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*);
- Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi barang modal (*capital expenditure*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*);
- Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal;
- Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai

negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet OPD yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Ekuitas
Dana*

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk penyusutan aset tetap belum diterapkan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp... atau ... persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00.
- b. Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00.
- c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp 16.267.800.977,00 atau 95 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 17.158.353.500,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 13.605.424.599,00 atau 90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 15.116.515.460,00.
- c. Belanja Hibah sebesar Rp 2.809.666.475,00 atau 77 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.647.000.000,00.
- d. Belanja Modal sebesar Rp.9.434.109.617,00 atau 89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 10.596.110.540,00.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Penerimaan Pajak Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Lain-lain PAD yang Sah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
2	Realisasi Belanja Daerah	Rp 46.517.979.500,00	Rp 42.117.001.668,00	91
	- Belanja Pegawai	Rp 17.158.353.500,00	Rp 16.267.800.977,00	95
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.116.515.460,00	Rp 13.605.424.599,00	90
	- Belanja Hibah	Rp 3.647.000.000,00	Rp 2.809.666.475,00	77
	- Belanja Modal	Rp 10.596.110.540,00	Rp 9.434.109.617,00	89

5.1.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

*Realisasi
Pendapatan
Asli Daerah
Rp 0,00*

- Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00
- Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,00 atau 0 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 0,00

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	- Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	-Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	-Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	-Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	Jumlah Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00	0

5.1.2.2. Belanja

Realisasi Belanja Rp. 42.117.001.668,00

Realisasi Belanja pada TA 2014 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp 16.267.800.977,00 atau 95 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 17.158.353.500,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 13.605.424.599,00 atau 90 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 15.116.515.460,00
- Belanja Hibah sebesar Rp 2.809.666.475,00 atau 77 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.647.000.000,00
- Belanja Modal sebesar Rp 9.434.109.617,00 atau 89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 10.596.110.540,00

Realisasi belanja dan anggaran Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 17.158.353.500,00	Rp 16.267.800.977,00	94,81
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.116.515.460,00	Rp 13.605.424.599,00	90

2.1.5	Belanja Hibah Barang		Rp 3.647.000.000,00	Rp 2.809.666.475,00	77,04
		Bel. Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 3.647.000.000,00	Rp 2.809.666.475,00	
2.2	Belanja Modal		Rp 10.596.110.540,00	Rp 9.434.109.617,00	89,03
		Jumlah Belanja	Rp 46.517.979.500,00	Rp 42.117.001.668,00	90,54

Realisasi Belanja TA 2014 pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 42.117.001.668,00 atau 91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 46.517.979.500,00 penyerapan anggaran tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan karena :

- Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa hanya terealisasi sebesar 73,53% dari yang dianggarkan karena efisiensi hasil lelang;
- Kegiatan Optimalisasi ISO Bapusipda Provinsi Jawa Barat terealisasi sebesar 45,60% dari yang dianggarkan karena yang disertifikasi ISO:9001 baru bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
- Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi SDM dan Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan terealisasi sebesar 60,65% dari yang dianggarkan karena akreditasi dan sertifikasi SDM dan lembaga perpustakaan tidak bisa dilaksanakan, Bapusipda bekerja sama dengan PERPUSNAS RI tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena waktu yang tidak memungkinkan;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 74,92% karena pembatalan kontrak pengadaan meja tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan(wanprestasi) dan hasil efisiensi pengadaan sarana dan prasarana lainnya.

Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2014 dan 2013, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini:

Kode Ring	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013	% Naik/Turun
1	2	3	4	5= ((3-4)/4)x100 %
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 16.267.800.977,00	Rp 16.305.489.179,00	0,23
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.605.424.599,00	Rp 12.761.032.649,00	6,62

2.1.5	Belanja Hibah	Rp 2.809.666.475,0 0	Rp 5.950.214.041, 00	(52,78)
2.2	Belanja Modal	Rp 9.434.109.617,0 0	Rp 15.520.032.52 5,00	(39,21)
	Jumlah Belanja	Rp 42.117.001.668, 00	Rp 50.536.768.39 4,00	(16,66)

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 42.117.001.668,00 sedangkan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 50.536.768.394,00 Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2014 menurun sebesar Rp 8.419.766.726,00 atau 16,66 persen dibanding TA 2013. Penurunan ini disebabkan karena penurunan anggaran tahun 2014 dan hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa.

5.1.2.2.1. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp
16.267.800.
977,00*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 sebesar Rp 16.267.800.977,00 atau 95 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 17.158.353.500,00 Realisasi Belanja tersebut belum mencapai/melebihi 100 persen pagu anggaran, hal ini disebabkan karena: adanya honorarium PNS Non Provinsi dan honorarium non PNS untuk pembayaran transport kepala desa dan pendamping tidak terealisasi karena kegiatan seremonial tidak dilaksanakan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Kode Ring	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013	% Naik/Turun
1	2	3	4	5=((3-4)/4)x100 %
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	Rp 7.803.088.852, 00	Rp 7.420.091.45 4,00	5,16
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 7.470.303.225, 00	Rp 7.296.631.72 5,00	2,38
5.2.1.01	Honorarium PNS	Rp 248.250.000,0 0	Rp 362.166.000, 00	(31,45)
5.2.1.02	Honorarium PNS Non Provinsi	Rp 84.400.000,00	Rp 344.650.000, 00	(75,51)
5.2.1.03	Honorarium Non PNS	Rp 30.500.000,00	Rp 190.450.000, 00	(83,98)
5.2.1.04	Uang Lembur	Rp 600.058.900,0 0	Rp 657.000.000, 00	(8,67)
5.2.1.06	Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga/masyarakat	Rp 0,00	Rp 34.500.000,0 0	(100)

5.2.1.07	Uang Jahit Pakaian	Rp 31.200.000,00	Rp 0,00	100
	Jumlah	Rp 16.267.800.97 7,00	Rp 16.305.489.1 79,00	(0,23)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 16.267.800.977,00 sedangkan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 16.305.489.179,00 Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2014 menurun sebesar Rp 37.688.200,00 atau 0,23 persen dibanding TA 2013. Penurunan ini disebabkan karena adanya honorarium PNS Non Provinsi dan honorarium non PNS untuk pembayaran transport kepala desa dan pendamping tidak terealisasi karena kegiatan seremonial tidak dilaksanakan.

*Belanja
Barang dan
Jasa Rp
16.415.091.
074,00.*

5.1.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2014 sebesar Rp 16.415.091.074,00. atau 87,48 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja tersebut belum mencapai/mendekati 100 persen pagu anggaran, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Kode Ring	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013	% Naik/Turun
1	2	3	4	5=((3-4)/4)x100 %
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 1.590.791.652, 00	Rp 1.208.836.75 5,00	31,60
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	Rp 221.680.679,0 0	Rp 61.292.763 ,00	261,68
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	Rp 4.536.830.138, 00	Rp 1.980.177.93 5,00	129,11
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	Rp 0,00	Rp 0,00	0
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 195.842.773,0 0	Rp 233.724.046, 00	(16,21)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 1.204.447.475, 00	Rp 1.341.681.25 5,00	(10,23)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp 106.480.000,0 0	Rp 27.000.000,0 0	294,37
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 0,00	Rp 73.400.000,0 0	(100)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	Rp 0,00	Rp 0,00	0

5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 28.010.000,00	Rp 129.261.980,00	(78,33)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 678.381.500,00	Rp 732.602.500,00	(7,40)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 64.042.500,00	Rp 0,00	100
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	Rp 7.500.000,00	Rp 0,00	100
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Rp 52.850.000,00	Rp 54.597.600,00	(3,20)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	Rp 2.823.483.796,00	Rp 2.369.584.801,00	19,16
5.2.2.20	Belanja Jasa konsultansi	Rp 94.495.273,00	Rp 2.228.339.700,00	(95,76)
5.2.2.21	Belanja Pemeliharaan	Rp 378.081.250,00	Rp 365.484.084,00	3,45
5.2.2.22	Belanja Jasa Pemeliharaan Konstruksi	Rp 1.502.390.263,00	Rp 1.809.681.030,00	(16,98)
5.2.2.24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 120.117.300,00	Rp 145.368.200,00	(17,37)
5.2.2.25	Belanja Barang/aset yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	Rp	Rp	0
5.2.2.26	Belanja hibah barang/jasa	Rp	Rp	0
	Jumlah	Rp 13.605.424.599,00	Rp 18.711.246.690,00	(27,29)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 13.605.424.599,00 sedangkan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 18.711.246.690,00 Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2014 menurun sebesar Rp 5.105.822.091,00 atau 27,29 persen dibanding TA 2013. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan anggaran tahun 2014.

5.1.2.2.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2014 sebesar Rp 2.809.666.475,00 atau 77 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja Hibah merupakan konversi/reklasifikasi dari realisasi belanja barang dan jasa yang diperuntukkan Pihak Ketiga/Masyarakat (koding 5.2.2.26) dan realisasi Belanja Hadiah (5.2.2.27).

Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Kode Ring	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013	% Naik/Turun
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100 \%$
5.2.2.25	Belanja Barang/aset yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	Rp 0,00	Rp 5.950.214.041,00	(100)
5.2.2.26	Belanja Hibah Barang/Jasa	Rp 2.809.666.475,00	Rp 0,00	100
5.2.2.27	Belanja Uang/Barang Untuk Diberikan kepada Pemenang Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan	Rp 0,00	Rp 0,00	0
	Jumlah	Rp 2.809.666.475,00	Rp 5.950.214.041,00	(52,78)

5.1.2.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal Rp 9.434.109.617,00

Realisasi Belanja Modal TA 2014 sebesar Rp 9.434.109.617,00 atau 10,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 10.596.110.540,00. Realisasi Belanja tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Kode Ring	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2013	% Naik/Turun
1	2	3	4	$5 = \frac{(3-4)}{4} \times 100 \%$
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00	0
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 5.631.178.170,00	Rp 8.420.097.790,00	(33,12)
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 165.815.771,00	Rp 398.228.623,00	(58,36)
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00	Rp 0,00	0
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3.518.394.216,00	Rp 6.701.706.112,00	(47,50)
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 118.721.460,00	Rp 0,00	100
	Jumlah	Rp 9.434.109.617,00	Rp 15.520.032.525,00	(39,21)

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 9.434.109.617,00 sedangkan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 15.520.032.525,00 Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2014 menurun sebesar Rp 6.085.922.908,00 atau 39,21 persen dibanding TA 2013. Penurunan ini disebabkan karena :

- Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa hanya terealisasi sebesar 73,53% dari yang dianggarkan karena efisiensi hasil lelang;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 74,92% karena pembatalan kontrak pengadaan meja tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan(wanprestasi) dan hasil efisiensi pengadaan sarana dan prasarana lainnya.

5.1.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada Tahun 2014, terjadi perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya yang disebabkan faktor-faktor sebagai berikut, seperti:

*Catatan
Penting
Lainnya*

- Perubahan anggaran atau keterlambatan penerimaan dokumen perubahan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan dan atau pelaporan.
- Adanya honorarium PNS Non Provinsi dan honorarium non PNS untuk pembayaran transport kepala desa dan pendamping pada Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa tidak terealisasi karena kegiatan seremonial tidak dilaksanakan.
- Kegiatan Membuat Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Desa hanya terealisasi sebesar 73,53% dari yang dianggarkan karena efisiensi hasil lelang;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 74,92% karena pembatalan kontrak pengadaan meja tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan(wanprestasi).

PENJELASAN TENTANG ANGGARAN DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 mempunyai kegiatan yang didanai dari APBN yaitu :

Program Pengembangan Perpustakaan.

Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, jumlah anggaran sebesar Rp. 379.630.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 366.464.500,00 atau 96,53 persen dari yang dianggarkan.

5.2. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

5.2.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Uraian	31-Des-14	31-Des-13 (Audited)	% Naik/(Turun)
Aset	Rp 131.793.670.906,00	Rp 122.091.238.733,00	Rp 9.702.432.173,00
Kewajiban	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Ekuitas Dana	Rp 131.793.670.906,00	Rp 122.091.238.733,00	Rp 9.702.432.173,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp 131.793.670.906,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 3.556.500,00 , Aset Tetap sebesar Rp 129.312.104.698,00 , dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.478.009.708,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,00

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp 131.793.670.906,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 3.556.500,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 131.790.114.406,00.

5.2.2. PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1. Aset Lancar

5.2.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Uang Kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Kas Uang Tunai	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Kas di Bank	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00

5.2.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Pajak dan Retribusi). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah.

Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:

NO	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Penerimaan Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Penerimaan Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 0,00	Rp 0,00
4.	Penerimaan Lain-lain	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

Dalam rekening Bendahara Penerimaan pada Bank ... terdapat saldo sebesar Rp 0,00 yang bukan merupakan saldo dari akun Kas di Bendahara Penerimaan, yang terdiri dari:

NO	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Pendapatan Non-PAD	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Jasa Giro (setelah dikurangi pajak)	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Saldo Awal Pembukaan Rekening	Rp 0,00	Rp 0,00
4.	Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

Piutang Pajak Rp 0,00

5.2.2.1.3. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Rincian Piutang Pajak, terdiri dari :

No	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Piutang Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Piutang Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Piutang Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 0,00	Rp 0,00

Berdasarkan umurnya, piutang pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Sampai dengan 3 tahun	Rp 0,00
2.	Lebih dari 3 Tahun s/d 5 Tahun	Rp 0,00
3.	Lebih dari 5 Tahun	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 0,00

Dalam piutang pajak sebesar Rp 0,00 tersebut terdapat piutang sebesar Rp 0,00 telah daluwarsa penagihannya. Dari piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp 0,00 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp 0,00 dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur sebesar Rp 0,00 Pada tahun 2014 telah dihapusbukukan piutang pajak sebesar Rp 0,00 dengan Keputusan Gubernur Nomor.....Tentang.....

5.2.2.1.4. Piutang Retribusi

*Piutang
Retribusi Rp
0,00*

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 , sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 , sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 . Hal ini berarti mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen.

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi daerah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar

Rincian Piutang Retribusi, terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-2014 (Rp)	31-Des-2013 (Audited) (Rp)
1.	Piutang Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Piutang Retribusi	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00

Berdasarkan umurnya, piutang retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Sampai dengan 2 tahun	Rp 0,00
2.	Lebih dari 2 Tahun s/d 3 Tahun	Rp 0,00
3.	Lebih dari 3 Tahun	Rp 0,00
	JUMLAH	Rp 0,00

Dalam piutang retribusi sebesar Rp 0,00 tersebut terdapat piutang sebesar Rp 0,00 telah daluwarsa penagihannya. Dari piutang retribusi yang telah daluwarsa sebesar Rp 0,00 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp 0,00 dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur sebesar Rp 0,00. Pada Tahun 2014 telah dihapusbukukan piutang retribusi sebesar Rp 0,00 dengan Keputusan Gubernur Nomor..... Tentang.....

*Piutang
Lainnya Rp
0,00*

5.2.2.1.5. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00, berarti mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen.

Rincian Piutang Lainnya, terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Piutang	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Piutang	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Dsb.....	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

*Persediaan
Rp
3.556.500,00*

5.2.2.1.6. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 3.556.500,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.171.600,00, berarti mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen

Rincian Persediaan, terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	Rp 3.556.500,00	Rp 4.171.600,00
2.	Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	Rp 0,00	Rp 0,00
4.	Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 3.556.500,00	Rp 4.171.600,00

Sedangkan Rincian persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Alat Tulis Kantor	Rp 3.556.500,00	Rp 4.171.600,00
2.	Cetakan	Rp	Rp
3.	Material	Rp	Rp
4.	Alat kebersihan	Rp	Rp
5.	Bahan/Bibit Tanaman	Rp	Rp
6.	Alat Kesehatan	Rp	Rp
7.	Bahan Obat-obatan	Rp	Rp
8.	Rp	Rp
9.	Rp	Rp
10	Rp	Rp
Jumlah		Rp 3.556.500,00	Rp 4.171.600,00

*** (Khusus Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian TP, Dinas Kehutanan).**

Nilai persediaan Ternak/Bibit/Tanaman sebesar Rp..... dihitung berdasarkan hasil Stock Opname masing-masing jenis ternak/bibit per 31 Desember 2014 dan dinilai berdasarkan Harga Pokok Produksi/ Standar Belanja Operasional untuk masing-masing jenis persediaan yaitu:

- a) Biaya-biaya yang menjadi komponen dalam menghitung Harga Pokok Produksi Ternak dan Hasil Ternak antara lain:
 - (a) Biaya Tenaga Kerja Langsung;
 - (b) Bahan Baku;
 - (c) Pakan;
 - (d) Biaya Kesehatan;
 - (e) Sarana dan Prasarana;
 - (f) Biaya Lainnya yang digunakan secara langsung untuk memproduksi/mengembangbiakkan ternak.
- b) Biaya-biaya yang menjadi komponen dalam menghitung Harga Pokok Produksi Tanaman atau Bibit/Benih Tanaman antara lain:
 - (a) Biaya Tenaga Kerja Langsung;
 - (b) Bahan Baku;
 - (c) Media;
 - (d) Pupuk;
 - (e) Obat-obatan dan biaya kesehatan Tanaman;
 - (f) Sarana dan Prasarana;
 - (g) Biaya lainnya yang digunakan secara langsung untuk memproduksi/mengembangbiakkan Tanaman.

Biaya
Dibayar di
Muka
Rp 0,00

5.2.2.1.7. Biaya Dibayar di Muka

Saldo Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Rincian Biaya Dibayar di Muka, terdiri dari:

No	Jenis Biaya Dibayar di Muka	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)
1.	Asuransi	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Dst	Rp	Rp
3.	Rp	Rp
4.	Rp	Rp
5.	Rp	Rp
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

Aset Tetap
Rp
129.312.104.
698,00

5.2.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp 129.312.104.698,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 119.498.218.581,00 Hal ini berarti Nilai Aset Tetap TA 2014 meningkat sebesar Rp. 9.813.886.117,00 dibanding TA 2013. Mutasi Nilai Aset Tetap berdasarkan data dari pengurus barang.

Rincian nilai aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013 (Audited)	% Naik/(Turun)
1.	Tanah	Rp 11.075.160.0 00,00	Rp 11.075.160.0 00,00	0
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 48.554.416.1 09,00	Rp 42.556.163.6 79,00	14,09
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 51.824.059.3 74,00	Rp 51.526.819.9 03,00	0,58
4.	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	Rp 289.103.779, 00	Rp 289.103.779, 00	0
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 17.569.365.4 36,00	Rp 14.050.971.2 20,00	25,04
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0
Jumlah		Rp 129.312.104. 698,00	Rp 119.498.218. 581,00	8,21

5.2.2.2.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 11.075.160.000,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 11.075.160.000,00. Hal ini berarti Nilai Tanah TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 0,00 dibanding TA 2013.

No	Jenis	Saldo Akhir 2013 Rp	Saldo Awal 2014 Rp	Mutasi		Saldo Akhir Rp
				Tambah Rp	Kurang Rp	
1.	Tanah Kantor	11.075.160. 000,00	11.075.160 .000,00	0,00	0,00	11.07 5.160. 000,0 0
2.	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit					
3.	Dst					
	(lihat koding di Permendagri No. 13 Tahun 2006					

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	11.075.160.000,00
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset tetap tanah	Rp	0,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp	0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan:		
Penghapusan	Rp	0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp	11.075.160.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam LRA periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

Mutasi Penambahan tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

- | | |
|--|---------|
| a. Biaya Persiapan (Pengurusan/ sertifikat/ dan lain sebagainya) | Rp 0,00 |
| b. Pemeliharaan Non Rutin | Rp 0,00 |
| c. dll | Rp 0,00 |

Jumlah	Rp 0,00
---------------	----------------

Nilai tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.075.160.000,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari tanah atas bangunan dan lahan parkir yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 629 Bandung seluas 5.730 M2; tanah atas bangunan dan lahan parkir di Jl. Kawalayaan Indah II no 4 Soekarno Hatta Bandung seluas 12.500 M2; tanah yang berada di Jl. Derwati (Blok Rancacili) Desa Margasari Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas 1.400 M2.

5.2.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp 48.554.416.109,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 42.556.163.679,00. Hal ini berarti Nilai Peralatan dan Mesin TA 2014 meningkat sebesar Rp 5.998.252.430,00 dibanding TA 2013.

Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Saldo Akhir 2013 Rp	Saldo Awal 2014 Rp	Mutasi		Saldo Akhir Rp
				Tambah Rp	Kurang Rp	
1.		42.556.163.679,00	42.556.163.679,00	5.998.522.430,00	0,00	48.554.416.109,00
2.						
3.						

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	42.556.163.679,00
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	Rp	4.997.305.480,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp	789.040.000,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	424.980.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	6.211.325.480,00
Pengurangan:		
Penghapusan	Rp	0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp	124.000.000,00
Koreksi Pencatatan	Rp	89.073.050,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	213.073.050,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp	48.554.416.109,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.997.305.480,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 5.631.178.170,00
Jumlah Belanja		Rp 5.631.178.170,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Peralatan dan Mesin pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari:

Kodering	Uraian	Jumlah
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 12.990.560,00
Jumlah Belanja		Rp 12.990.560,00

Penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan komputer PC unit untuk server sebesar Rp. 12.990.560,00

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Menjadi:

Kodering	Uraian	Jumlah
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 29.150.000,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 58.063.500,00
Jumlah Belanja		Rp 87.213.500,00

Pengurangan realisasi belanja modal peralatan dan mesin menjadi gedung dan bangunan(pintu sliding Aula PBI) sebesar Rp. 29.150.000,00; menjadi aset lainnya (aset tidak berwujud) berupa komputer mainframe/OS window server sebesar Rp. 58.063.500,00;

- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan mesin, sebesar Rp 559.649.750,00 terdiri dari : Tinta printer dan kelengkapan penunjang e-library Rp. 136.122.250,00, Title tape, instalasi dan jaringan, pelatihan sebesar Rp. 368.500.000,00, pemeliharaan rak buku perpustakaan sebesar Rp. 55.027.500,00.

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 559.649.750,00 dan terdapatnya penambahan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Jasa Konsultan	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
c. Dll.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00

Penerimaan dari OPD lain yaitu dari Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 789.040.000,00 merupakan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 4 unit, berdasarkan Berita Acara Serah Terima terlampir. Terdapat koreksi pencatatan

sebesar Rp. 424.980.000,00 merupakan penambahan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 unit berdasarkan berita acara serah terima tanggal 30 Desember 2013 yang belum dicatat. Berita acara serah terima terlampir.

Penyerahan aset tetap ke OPD lain yaitu ke Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berupa 1 unit kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 124.000.000,00, berdasarkan berita acara serah terima terlampir.

Pengurangan aset tetap (koreksi pencatatan) sebesar Rp. 89.073.050,00 berupa barang-barang yang nilai perolehan per satuannya di bawah Rp. 500.000,00 dipindahkan pencatatannya ke extracomtable.

5.2.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 51.824.059.374,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 51.526.819.903,00 Hal ini berarti Nilai Gedung dan Bangunan TA. 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 297.239.471,00 dibanding TA. 2013.

Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Jenis	Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		2013	2014	Tambah	Kurang	Akhir
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.		51.526.819.903,00	51.526.819.903,00	297.239.471,00	0,00	51.824.059.374,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	51.526.819.903,00
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	Rp	194.965.771,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp	0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp	102.273.700,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	297.239.471,00

Pengurangan:	
Penghapusan	Rp 0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pengurangan	Rp 0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp 51.824.059.374,00

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 194.965.771,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 165.815.771,00
Jumlah Belanja		Rp 165.815.771,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Gedung dan bangunan, yaitu berasal dari:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 29.150.000,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp
	BM Aset Lainnya	Rp
Jumlah Belanja		Rp 29.150.000,00

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap yang Lain yaitu Menjadi:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebesar Rp 0,00

Penambahan gedung dan bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Gedung dan Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja/ Biaya Konsultan Pengawas	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
		102.273.700,
c. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp	00
		<u>102.273.700,</u>
Jumlah	Rp	00

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Bangunan Gedung Permanen lantai 7 luas 10.000 M2 yang merupakan gedung kearsipan terletak di Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung; Bangunan Gedung Permanen 2 lantai luas 1.950 M2 yang dipergunakan sebagai gedung layanan perpustakaan terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 629 Bandung; Gedung Permanen 4 lantai luas 5.380 M2 sebagai Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional yang terletak di Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung.

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar 297.239.471,00 terdiri dari :

Penambahan nilai gedung Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional (PBI) terdiri dari : pembuatan pintu gerbang dan pagar Gedung PBI sebesar Rp. 78.141.613,00; Pos jaga Gedung PBI sebesar Rp.59.104.512,50; pintu sliding Aula PBI sebesar Rp. 29.150.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi aset gedung dan bangunan.

Penambahan nilai Gedung Arsip terdiri dari : Pembuatan bak sampah sebesar Rp. 28.569.645,50; pembuatan shelter mobil dan motor gedung arsip sebesar Rp. 102.273.700,00 yang merupakan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa.

5.2.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 99.878.507,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 99.878.507,00. Hal ini berarti Nilai Jalan dan Jembatan TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 0,00 dibanding TA 2013.

Mutasi Jalan dan Jembatan

No	Jenis	Saldo Akhir 2013	Saldo Awal 2014	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.		99.878.507,00	99.878.507,00	0,00	0,00	99.878.507,00

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 99.878.507,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Jalan dan Jembatan (*)	Rp 0,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp 0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 0,00
Pengurangan:	
Penghapusan	Rp 0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pengurangan	Rp 0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp 99.878.507,00

(*) Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang menjadi Aset tetap Jalan dan Jembatan sebesar Rp 0,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada LRA Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Jalan dan Jembatan pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jalan dan Jembatan, yaitu berasal dari:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Yang Menjadi:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan dan Jembatan, sebesar Rp 0,00

Penambahan Jalan dan Jembatan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Jalan dan Jembatan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Biaya Konsultan Pengawas/Biaya Konsultan Perencana	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
c. Dll.....	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jalan sebesar Rp. 99.878.507,00 merupakan jalan di gedung layanan perpustakaan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Nomor 629 Bandung

5.2.2.2.5. Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 106.949.272,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 106.949.272,00. Hal ini berarti nilai Irigasi TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp... dibanding TA 2013.

Mutasi Irigasi

No	Jenis	Saldo Akhir 2013	Saldo Awal 2014	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		106.949.272, 00	106.949.272 ,00	0,00	0,00	106.9 49.27 2,00

Mutasi/perubahan Irigasi tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	106.949.272,00
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Irigasi (*)	Rp	0,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp	0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan:		
Penghapusan	Rp	0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp	106.949.272,00

(*) Realisasi Belanja Modal Irigasi yang menjadi Aset tetap Irigasi sebesar Rp 0,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Irigasi pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Irigasi	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Irigasi pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Irigasi, yaitu berasal dari:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Irigasi pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Menjadi:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Irigasi, sebesar Rp 0,00

Penambahan Irigasi tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Irigasi yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Biaya Konsultan	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
c. Dll.....	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.2.2.6. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2014 sebesar Rp..., sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 82.276.000,00. Hal ini berarti nilai Jaringan TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp... dibanding TA 2013.

Mutasi Jaringan

No	Jenis	Saldo Akhir 2013 Rp	Saldo Awal 2014 Rp	Mutasi		Saldo Akhir Rp
				Tambah Rp	Kurang Rp	
		82.276.000,00	82.276.000,00	0,00	0,00	82.276.000,00

Mutasi/perubahan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 82.276.000,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Jaringan (*)	Rp 0,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp 0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 0,00
Pengurangan:	
Penghapusan	Rp 0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pengurangan	Rp 0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp 82.276.000,00

(*) Realisasi Belanja Modal Jaringan yang menjadi Aset tetap Jaringan sebesar Rp 0,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Jaringan pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Jaringan	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Jaringan pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jaringan, yaitu berasal dari:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Jaringan pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Menjadi:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jaringan, sebesar Rp 0,00

Penambahan Jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Konsultan	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
c. Dll.....	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.2.2.2.7. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 17.569.365.436,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 14.050.971.220,00. Hal ini berarti Nilai Aset Tetap Lainnya TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 3.518.394.216,00 dibanding TA 2013

Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Jenis	Saldo Akhir 2013 Rp	Saldo Awal 2014 Rp	Mutasi		Saldo Akhir Rp
				Tambah Rp	Kurang Rp	
		14.050.971.220,00	14.050.971.220,00	3.518.394.216,00	0,00	17.569.365.436,00

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	14.050.971.220,00
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Lainnya (*)	Rp	3.518.394.216,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp	0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	3.518.394.216,00
Pengurangan:		
Penghapusan	Rp	0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp	0,00
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp	17.569.365.436,00

(*) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.518.394.216,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada LRA Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Aset Tetap Lainnya	Rp 3.518.394.216,00
Jumlah Belanja		Rp 3.518.394.216,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Aset Tetap Lainnya pada LRA Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Aset Tetap Lainnya, yaitu berasal dari:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada LRA Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Menjadi:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 0,00

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp 0,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Konsultan	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Penambahan Aset tetap lainnya sebesar Rp. 3.518.394.216,00 merupakan pengadaan buku perpustakaan.

5.2.2.2.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00. Hal ini berarti Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 0,00 dibanding TA 2013.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Jenis	Saldo Akhir 2013	Saldo Awal 2014	Mutasi		Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Tanah					
2.	Peralatan dan Mesin					
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
5.	Aset Tetap Lainnya					
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aset
Lainnya Rp
2.478.009.708,00*

5.2.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.478.009.708,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.588.848.552,00. Hal ini berarti Nilai Aset Lainnya TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 110.838.844,00 dibanding TA 2013.

Aset Lainnya terdiri dari :

No	Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013 (Audited)
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp 0,00	Rp 0,00
2.	Tuntutan Ganti Rugi	Rp 0,00	Rp 0,00
3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0,00	Rp 0,00

4.	Aset Tak Berwujud	Rp 2.478.009.708,00	Rp 2.265.120.035, 00
5.	Aset Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 323.728.517,00
Jumlah		Rp 2.478.009.708,00	Rp2.588.848.5 52,00

Penambahan Aset lainnya sebesar Rp. 212.889.673,00 terdiri dari :

Pembuatan software edutainment library sebesar Rp. 105.730.900,00; pengadaan komputer mainframe/OS window server sebesar Rp. 58.063.500,00. Serta Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 49.095.273,00 merupakan belanja jasa konsultansi perancangan (design) berupa pembuatan Detail Engineering Design mesjid.

Penghapusan aset lainnya sebesar Rp. 323.728.517,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 028/Kep.716-PBD/2014 tentang Persetujuan penghapusan barang inventarsi alat perlengkapan kantor terdiri dari :

Peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat sebesar Rp. 274.464.437,00; Gedung dan bangunan berupa rumah dinas yang kondisinya rusak berat sebesar Rp. 47.764.080,00; Aset Tetap Lainnya berupa alat calung yang kondisinya rusak berat. sebesar Rp. 1.500.000,00.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terlampir.

5.2.2.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran, terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	

5.2.2.3.2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	

5.2.2.3.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 , sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:

No	Uraian	Piutang PNB	Keterangan
1	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	

5.2.2.3.4. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.478.009.708,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.265.120.035,00. Hal ini berarti Nilai Aset Tak Berwujud TA 2014 meningkat/menurun sebesar Rp 212.889.673,00 dibanding TA 2013.

Mutasi Aset Tak Berwujud

No	Jenis	Saldo Akhir 2013 Rp	Saldo Awal 2014 Rp	Mutasi		Saldo Akhir Rp
				Tambah Rp	Kurang Rp	
		2.265.120.035,00	2.265.120.035,00	212.889.673,00	0,00	2.478.009.708,00

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 2.265.120.035,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tak Berwujud (*)	Rp 163.794.400,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	Rp 0,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	Rp 49.095.273,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Rp 0,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 212.889.673,00
Pengurangan:	
Penghapusan	Rp 0,00
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	Rp 0,00
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Rp 0,00

Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	0,00
Jumlah Per 31 Des 2014	Rp	2.478.009.708,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	Software edutainment library	Rp 105.730.900,00
	OS window server	Rp 58.063.500,00
Jumlah Belanja		Rp 163.794.400,00

Penambahan Aset Tak Berwujud tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud sebesar Rp 0,00 dan terdapatnya penambahan Aset Tak Berwujud yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Belanja Konsultan	Rp	0,00
b. Pemeliharaan Non Rutin.	Rp	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa Konsultansi)		49.095.27
	Rp	3,00
		49.095.27
Jumlah	Rp	3,00

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 49.095.273,00 merupakan belanja jasa konsultansi perancangan (design) berupa pembuatan Detail Engineering Design mesjid.

(* Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud yang menjadi Aset Aset Tak Berwujud sebesar Rp 163.794.400,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Koding	Uraian	Jumlah
	BM Aset Tak Berwujud	Rp 118.721.460,00
Jumlah Belanja		Rp 118.721.460,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal **selain** Aset Tak Berwujud pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Aset Tak Berwujud, yaitu berasal dari BM Peralatan dan Mesin berupa komputer main frame/OS window server sebesar Rp. 58.063.500,00 :

Kodering	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 58.063.500,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 58.063.500,00

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada **LRA** Tahun Anggaran 2014 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu Menjadi BM Peralatan dan Mesin berupa komputer PC unit untuk server sebesar Rp. 12.990.560,00 :

Kodering	Uraian	Jumlah
	BM Tanah	Rp 0,00
	BM Peralatan dan Mesin	Rp 12.990.560,00
	BM Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
	BM Aset Lainnya	Rp 0,00
Jumlah Belanja		Rp 12.990.560,00

- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud, sebesar Rp 0,00

Aset tak berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 2.478.009.708,00 terdiri dari :

Buku elektronik (e-book) sebesar Rp. 1.570.737.335,00 dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa konsultasi berupa pengadaan software e-library sebesar Rp. 694.382.700,00.

Penambahan dari Belanja Modal pengadaan TA 2014 berupa Software edutainment library sebesar Rp. 105.730.900,00 dan OS window server sebesar Rp. 58.063.500,00.

Penambahan dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 49.095.273,00 merupakan pembuatan Detail Engineering Design mesjid.

5.2.2.3.5. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 323.728.517,00. Hal ini berarti saldo Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp 323.728.517,00 atau 100 % dibanding TA. 2013.

Aset Lain-lain terdiri dari :

No	Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013 (Audited)
1.	Aset Tetap Kondisi Rusak Berat / akan dihapuskan	Rp 0,00	Rp 323.728.517,00
2.	Rp	Rp
3.	Rp	Rp
Jumlah		Rp 0,00	Rp 323.728.517,00

Aset Lain-lain sebesar Rp. 323.728.517,00 merupakan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan disebabkan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan, terdiri dari Peralatan dan mesin Rp. 274.464.437,00; Gedung dan bangunan Rp. 47.764.080,00; Aset tetap lainnya Rp. 1.500.000,00. Dan pada TA 2014 dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 028/Kep.716-PBD/2014 Tentang penghapusan barang inventaris alat perlengkapan kantor, tanggal 28 Mei 2014.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terlampir.

5.2.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Rp 0,00*

5.2.2.4.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 Hal ini berarti Kewajiban mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0 % dibanding TA. 2013.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga terdiri dari:

No	Jenis	31 Des 2014	31 Des 2013 (Audited)
1	Rp 0,00	Rp 0,00
2	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

“ Tidak terdapat utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013”

5.2.2.4.2. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

No	Jenis	31 Des 2014	31 Des 2013 (Audited)
1	Rp 0,00	Rp 0,00
2	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah		Rp 0,00	Rp 0,00

“ Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013”

5.2.2.5. Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas
Dana
Lancar Rp.
3.556.500,0
0*

5.2.2.5.1. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00, sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00.

Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Pajak dan Retribusi, Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya.

5.2.2.5.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 3.556.500,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.171.600,00.

Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

5.2.2.6. Ekuitas Dana Diinvestasikan

*Ekuitas
Dana
Diinvestasi
kan Rp.
131.790.11
4.406,00*

5.2.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp 129.312.104.698,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 119.498.218.581,00.

Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

5.2.2.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.478.009.708,00 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.588.848.552,00.

Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya.

5.2.3. CATATAN PENTING LAINNYA

*Catatan
Penting
Lainnya*

- Dalam Buku inventaris Bapusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2011 (KIB C Gedung dan Bangunan, penuangan nomor urut 21) tercatat rumah dinas permanen Golongan 1 Tipe C luas bangunan 70 M2 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 47.764.080,00 berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 629

Bandung. Kondisi saat ini rumah dinas tersebut sudah tidak ada karena diatas lahan tersebut sudah dibangun gedung kantor Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2010 gedung kantor tersebut berdasarkan Berita Acara Nomor 028/1.3/kepum telah diserahkan oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat kepada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, selanjutnya barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dicatat dalam Buku Inventaris milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk digunakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian gedung kantor tersebut dipergunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat sampai sekarang. Karena kami tidak menemukan dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk penghapusan aset bangunan rumah dinas tersebut, maka tahun 2013 dilakukan reklasifikasi ke dalam aset lainnya untuk diajukan penghapusannya, dan tahun 2014 telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 028/Kep.716-PBD/2014 Tentang penghapusan barang inventaris alat perlengkapan kantor, tanggal 28 Mei 2014.

- Barang-barang peralatan dan mesin sebesar Rp. 274.464.437,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 1.500.000,00 yang kondisinya sudah rusak berat termasuk rumah dinas sudah direklasifikasi ke dalam aset lainnya sebesar Rp. 323.728.517,00 dan tahun 2014 telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 028/Kep.716-PBD/2014 Tentang penghapusan barang inventaris alat perlengkapan kantor, tanggal 28 Mei 2014.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 mempunyai kegiatan yang didanai dari APBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu :
Program Pengembangan Perpustakaan.
Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca jumlah anggaran sebesar Rp. 379.630.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 366.464.500,00 96,53 % dari jumlah anggaran.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

6.1. DOMISILI

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 629 Bandung Telepon 022 7310435 dan Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung Telepon 022 732048, 7320050, Faximil 022 7320049. Website : <http://bapusipda.jabarprov.go.id> e-mail : bapusipda@jabarprov.go.id Bandung Kode Pos 40285 – 40286.

6.2. DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, telah diatur mengenai kelengkapan organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat susunannya terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian;
3. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
4. Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca;
5. Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Bidang pengelolaan Kearsipan;
7. Bidang Akuisisi dan pelestarian;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

6.3. SUSUNAN MANAJEMEN

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.903-BKD/2011 tanggal 4 Juli 2011 Kepala Bapusipda Provinsi Jawa Barat adalah Ibu Hj. Enny Heryani Ratnasari Soebari, S.H., M.H.,C.N. dan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 mengalami pergantian menjadi , Ibu Hj. Tati Iriani, S.H., M.M. berdasarkan Surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1464.BKD/2014 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibantu oleh :

1. Sekretaris, DR. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si. dan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2014 mengalami pergantian menjadi Hj. Dian Widya Amanawati, S.H., C.N. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.353-BKD/2014 tentang Pengangkatan dan Pindahan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program, Drs. Febriadi, M.Si.
 - b. Kepala Subbagian Keuangan, Dra. Hj. Atin Rohaetin, S.Sos.
 - c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Drs. H. Rahmat Ripilita, M.Si.
2. Kepala Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan,
Dra. Hj. Oom Nurrohmah, M.Si.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca,
Dra. Ida Hendrawati
4. Kepala Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan,
Dra. Hj. Dinny Resmiati, M.Si.
5. Bidang pengelolaan Kearsipan, Drs. H. Dani Herdiana, M.Si. dan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2014 mengalami pergantian menjadi Drs. H. Dadang Abdulrahman, M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep.1464-BKD/2014 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Akuisisi dan Pelestarian, Umiati Uniswiyati, S.H., M.Si.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Arsiparis, semula 12 orang ditambah 5 orang pengangkatan tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2014 menjadi 17 orang;
 - b. Jabatan Fungsional Pustakawan semula 17 orang dikurangi 2 orang pensiun selama tahun 2014 sehingga per 31 Desember 2014 menjadi 17 orang.

BAB VII PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 42.117.001.668,00 atau 91 % dari anggaran sebesar Rp. 46.517.979.500,00 Rincian berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut : Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 16.267.800.977,00 Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 13.605.424.599,00 Realisasi Belanja Hibah Rp. 2.809.666.475,00 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 9.434.109.617,00.

Neraca Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah aset sebesar Rp. 131.793.670.906,00 Terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3.556.500,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 129.312.104.698,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 2.478.009.708,00 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 131.793.670.906,00. Terdiri dari Ekuitas Dana lancar sebesar Rp. 3.556.500,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 131.790.114.406,00.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.